



---

## PENERAPAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* SEBAGAI SISTEM BELANJA DI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH MERAPI

Griselda Enika Noora Rosalyni<sup>1)</sup>  
Nibras Anny Khabibah<sup>2)</sup>

Universitas Tidar

<sup>1)</sup>griseldarosalyni14@gmail.com

<sup>2)</sup>nibras@untidar.ac.id

### ***Abstract***

*Cash Management System is a service used to manage non-cash transactions using intermediaries. The purpose of this study is to determine how the application of Cash Management System or Non-Cash Transactions as a shopping system in Branch of Departement of Energy and Mineral Resources of Merapi Region. The method used in this research is descriptive qualitative method with primary data sources and secondary data. The result of this research is Cash Management System makes the payments easy, without cash withdrawals, only directly transferring the money to the third party.*

***Keywords:*** *Cash Management System; Expenditure; Internal Control*

### **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi ini, teknologi dan informasi menjadi lebih berkembang. Dengan adanya kemajuan teknologi akibat adanya globalisasi, hal ini memicu penggunaan internet agar dapat mempermudah urusan manusia, salah satunya adalah menghemat biaya dan waktu. Kemajuan teknologi dan informasi di berbagai bidang, salah satunya di bidang keuangan. Segala kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan timbulnya suatu sistem, yaitu *Cash Management System*. *Cash Management System* adalah sebuah layanan yang berfungsi sebagai perantara pembayaran transaksi non tunai antara badan dimana transaksi tersebut terekam pada sistem bank yang bersangkutan. Sistem ini digunakan untuk menghindari adanya penyelewengan dana belanja yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya sistem tersebut, setiap transaksi yang dilakukan oleh badan pemerintah atau perseorangan akan terekam dalam bank yang bersangkutan sehingga hal ini dapat mengurangi adanya penyelewengan uang.



Penerapan layanan ini dilakukan atas kerjasama antara BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Jateng, Diskominfo serta GRMS sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi *Non Tunai* pada Pemerintah Daerah dan Instruksi Gubernur No. 910/198 Tahun 2017 Tanggal 23 Nopember 2017 perihal Transaksi Non Tunai. Dengan adanya transaksi non tunai, maka secara tidak langsung dapat mengurangi beredarnya uang di masyarakat dan menekan beredarnya uang palsu, serta dapat memperkuat *good governance* dan menciptakan transparansi.

Sebelum menggunakan *Cash Management System*, tentu mekanisme transaksi tunai dilakukan dengan tunai apalagi dengan nominal yang besar dapat menimbulkan beberapa kendala seperti terhambatnya kegiatan operasional kantor karena masalah ketersediaan atau kesiapan uang di bendahara instansi, adanya indikasi atau potensi korupsi (penyelewengan uang) dari transaksi secara tunai yang ditutupi dengan tagihan fiktif, serta adanya biaya yang timbul akibat belum efektifnya manajemen kas seperti risiko kehilangan uang tunai yang berada di dalam brankas.

Masalah ketersediaan atau kesiapan uang persediaan di bendahara instansi dapat menghambat terlaksananya kegiatan operasional kantor. Jika kegiatan operasional kantor membutuhkan uang dengan jumlah yang banyak dan mendadak, kegiatan operasional tersebut akan terganggu apabila uang persediaan di bendahara instansi tidak tersedia atau tidak mencukupi. Biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan dengan menggunakan uang *cash* dapat menimbulkan penyelewengan dana anggaran. Dengan adanya penyelewengan dana anggaran dapat menimbulkan kerugian finansial negara. Dan terkait dengan biaya yang ditimbulkan karena adanya belum efektifnya manajemen kas dapat menimbulkan terjadinya biaya tambahan yang timbul seperti pembayaran bunga bank. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *Cash Management System* dalam pelaksanaannya sebagai sistem belanja di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Cash Management System* dalam pelaksanaannya sebagai sistem belanja di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi. Dengan itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian teoritis mengenai implementasi *Cash Management System* dalam perkembangan teknologi di era globalisasi pada pemerintahan, baik untuk peneliti yang akan datang maupun instansi.



---

## TELAAH PUSTAKA

### Cash Management System

Menurut OJK (2016) *Cash Management* adalah jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah. Dari definisi di atas dapat diartikan Bank bertindak berdasarkan perintah nasabah (dalam hal melakukan pembayaran) dan tidak dapat bertindak sebagai agen investasi. Definisi *Cash Management System* menurut Bank Jateng adalah jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.

Menurut Bank DKI, *Cash Management System* adalah solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara realtime dan online. Fasilitas ini khusus diberikan kepada nasabah perusahaan/ non-perorangan. Dengan adanya *Cash Management System*, hal ini akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan informasi posisi dana dari waktu ke waktu dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui sistem perbankan setiap saat secara online sehingga pengelolaan arus dana dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Cash Management System* adalah layanan transaksi non tunai yang dilakukan menggunakan fasilitas *online* bagi nasabah korporasi (non pribadi) dalam melakukan transaksi keuangan secara realtime dan online untuk memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan uang karena transaksi non tunai yang dilakukan akan terekam pada bank yang bersangkutan.

### Belanja Daerah

Menurut Priyo (2009:4), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada narasumber pembiayaan daerah, hal yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya, jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka hal itu terdapat ilmu fiskal.

### Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).



Menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2010: 161), efisiensi diidentifikasi sebagai hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan memberdaya (*input*) yang digunakan. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien jika mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu yang menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

### **Pengendalian Internal**

Pengendalian internal (internal control) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Carl S. Warren dan James M. Reeve (2005:235) dalam Feriyanto dan Hadian (2014). James A. Hall (2001:150) menyatakan bahwa : “Sistem kontrol internal merangkum kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat tujuan utama yaitu : (1). Untuk menjaga aktiva perusahaan; (2). Untuk menentukan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi; (3). Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan; (4). Untuk mengukur kesesuaian antara kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen”.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggambarkan obyek penelitian, ruang lingkup penelitian, desain penelitian, alat analisis data definisi operasional variabel dan Hipotesis jika menggunakan data kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif dijelaskan bagaimana proses dari perolehan data penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian yaitu deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif adalah “penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.”. Penelitian deskriptif diartikan sebagai metode analisis data dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan melukiskan subjek atau objek yang diteliti berdasarkan fakta yang terlihat atau apa adanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait, yaitu salah satu pegawai pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi. Data sekunder



merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain seperti buku dan internet.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi berarti penggabungan beberapa teknik pengambilan sumber data yang ada. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi merupakan unit pelaksana teknis pada dinas yang dibentuk berdasarkan Pergub Jateng No.45 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Prov. Jateng. Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Merapi merupakan salah satu cabang dinas milik Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Cabang dinas ini sudah ada sejak bulan November 2018, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi terdiri dari tiga bagian yaitu, Seksi Geominerba, Seksi Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan serta Bagian Tata Usaha yang ketiga bagian tersebut memiliki tugas pokok dalam melayani masyarakat dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral.

### Penerapan *Cash Management System* dalam Pelaksanaan Belanja pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi menerapkan *Cash Management System* sejak pertama kali cabang dinas tersebut didirikan, yaitu pada bulan November 2018. *CMS* adalah fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi pengguna dalam melakukan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* yang bertujuan untuk memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan. *Cash Management System* ini digunakan untuk membayar pembayaran dengan nilai nominal kurang dari sama dengan Rp 5.000.000,-. Transaksi non tunai secara garis besar adalah pembayaran yang tidak lagi dilakukan dengan uang *cash* dari tangan bendahara ke pihak ketiga tetapi dengan cara mentransfer langsung dari kas daerah melalui *Cash Management System* dengan persetujuan dari PPK-SKPD.

Dalam penerapannya pada sistem belanja, bagian Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi sangat terbantu karena dengan adanya transaksi non tunai, mereka tidak perlu



membawa uang ke mana-mana dan rasa was-was menjadi berkurang karena di dalam brankas sudah tidak ada uang tunai lagi dan tidak harus membawa uang banyak dalam bentuk *cash* saat melakukan kegiatan luar kota. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai, mereka hanya perlu melaksanakan transaksi selama 24 jam dengan mengoperasikan *Cash Management System* tersebut.

Dengan adanya *Cash Management System* dimna merupakan suatu layanan dalam bentuk *web base* atau alat untuk melakukan belanja dari UP/GU/TU secara non tunai. Pembayaran belanja daerah untuk UP/GU/TU kepada pihak ketiga dengan menggunakan *CMS* dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi akan membuat SPP UP/GU yang akan diserahkan kepada PPK-SKPD untuk membuat SPM UP/GU.
2. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran, maka bendahara akan membawa berkas-berkas tagihan kepada BUD beserta dokumen pendukung lainnya yang digunakan untuk memproses dokumen SP2D.
3. Melalui SP2D, bendahara dapat melakukan pencairan dana dan pembayaran non tunai.
4. Selanjutnya dalam melakukan pembayaran LS, mekanismenya hampir sama dengan pembayaran UP/GU, hanya saja dalam pembayaran LS PPTK dan menandatangani SPP-LS.
5. Selanjutnya, bendahara menyerahkan berkas SPP-LS kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan SPM-LS yang kemudian ditandatangani oleh pengguna anggaran.
6. Setelah itu, bendahara akan membawa SPM-LS tersebut ke BUD untuk memproses SP2D.
7. Setelah SP2D diterbitkan, dana akan langsung di transfer dari rekening BUD kepada pihak ke 3.

### **Penggunaan *Cash Management System* Dalam Sistem Belanja di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi**

Dalam sistem belanja di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi, *Cash Management System* melaksanakan berbagai belanja pembayaran tunai hanya dengan mentransfer ke rekening pihak ketiga. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya *Cash Management System*, transaksi yang dilakukan akan meningkatkan efektivitas dan menjadi lebih efisien.

Transaksi yang pembayarannya menggunakan *Cash Management System* mencakup transaksi belanja barang perjalanan dinas jabatan, belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja



pegawai, tunjangan prestasi kerja, pembayaran tenaga honorer, kegiatan yang berhubungan dengan pegawai.

Mekanisme atas pengeluaran-pengeluaran tersebut, dapat dilakukan oleh bendahara instansi dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD. SPP-UP, TU, dan LS yang diajukan dibuat rangkap 3: lembar 1 dan 2 untuk bendahara pengeluaran yang akan diteruskan ke PPK-SKPD dan PPKD, setelah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran. Lembar 3 diarsip oleh bendahara pembantu sedangkan SPPGU yang dianjurkan dibuat rangkap 2 yang dua-duanya diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

### **Penggunaan *Cash Management System* Dengan Pengendalian Internal Dalam Sistem Belanja di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi**

Dalam mengelola kas pemerintah, tentu dibutuhkan adanya pengendalian internal yang kuat agar kas yang dimiliki oleh pemerintah tidak akan digunakan untuk hal yang lain atau dapat dikatakan sebagai penyelewengan uang. Hal ini dikarenakan adanya transaksi non tunai yang dilakukan akan terekam pada bank bersangkutan dan menekan risiko kehilangan uang akibat kelalaian atau tindakan kejahatan sehingga akan terciptanya *good governance* serta keamanan data transaksi dapat terjaga dengan baik. Secara internal, sistem transaksi pembayaran non tunai lebih stabil dalam pembayaran dan sistem ini juga dapat memberikan rasa aman dari resiko yang akan datang walaupun sadar, bahwa pengelolaan keuangan penuh dengan resiko, misalnya seperti pencurian, dan tidak lagi menghitung uang secara manual yang mempunyai resiko salah hitung/resiko tinggi. Pengelolaan sistem transaksi non tunai ini dapat mempermudah dalam pembayaran transaksi dan berdampak positif baik terhadap pegawai dan Honorer maupun terhadap pengelola keuangan dan instansi. Selain itu, dengan adanya *Cash Management System*, bendahara instansi dapat dengan mudah melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* dalam bertransaksi. Hal ini berdampak pada sistem informasi dan pengendalian kas yang dapat memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu tentang kondisi dan aliran kas, seperti jumlah kas di tangan, tagihan, pembayaran, dan prediksi terhadap aliran kas dari pendapatan dan untuk belanja.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Penerapan *Cash Management System* dalam pelaksanaan sistem belanja pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi telah diterapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.



910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan Instruksi Gubernur No. 910/198 Tahun 2017 Tanggal 23 Nopember 2017 perihal Transaksi Non Tunai. Cabang Dinas dan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi melakukan penerapan *Cash Management System* sejak pertama kali didirikan cabang dinas tersebut. Penerapan ini dilakukan dengan melakukan transaksi kurang dari sama dengan 5.000.000,-. Pihak yang dapat menggunakan *Cash Management System* adalah bagian Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi.

2. Dengan adanya *Cash Management System*, bendahara instansi dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD untuk melakukan pembayaran belanja tunai. Hal ini menyebabkan transaksi menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Penerapan *Cash Management System* telah meningkatkan pengendalian internal instansi karena dengan adanya layanan ini maka segala transaksi tunai yang dilakukan akan dapat dimonitor 24 jam dan aman, terhindar dari risiko seperti pencurian, dan serta terhindar dari kesalahan hitung yang dilakukan secara manual

#### ACKNOWLEDGMENTS

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis berterima kasih kepada : (1) Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan jurnal ini, (2) Pegawai Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi, yang telah membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan jurnal ini, (3) Keluarga serta teman-teman semua yang telah mendukung dalam menyelesaikan jurnal ini.

#### DAFTAR REFERENSI

- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Feriyanto, O., & Hadian, E. (2014). Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Pengendalian Intern Pengeluaran Kas : Studi Deskriptif Pada UKM di Kota Bandung . *STAR - Study & Accounting Research Vol XI, No. 1*, 68-75.
- Gorahe, I. A., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara. *Efisiensi 14.3*.
- Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel . *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 136-150.



- Lontaan, I. C., & Pangerapan, S. (2016). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1, 898-906.
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1-16.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 220-229.
- Rundengan, F. D. (2016). Analisis Pendapatan Dan Penerapan Sistem Pengendalian Kas Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 367-375.
- Sari, I. (2020). Analisis Penerapan Cash Management System Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 1-8.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *In Prosiding Industrial Reserach Workshop and National Seminar (Vol. 20, No.1, 1171-1181*.
- Triyanto, D. W., Utomo, S. W., & Setyaningrum, F. (2018). Analisis Efektivitas Penerapan Cash Management System (CMS) Dalam Meningkatkan Value Added Activity Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun. *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi. Vol. 6. No. 2*.